

BAB II

GAMBARAN UMUM DIPLOMASI OLAHRAGA DAN KONTEKS PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA

Penyelenggaraan Piala Dunia bukan sekadar peristiwa olahraga global, melainkan juga menjadi bagian dari praktik hubungan internasional modern yang memadukan kekuatan budaya, ekonomi, dan politik dalam satu panggung global. Dalam konteks ini, diplomasi olahraga muncul sebagai sarana strategis negara-negara untuk membentuk citra, memperluas pengaruh, dan memperkuat posisi mereka di antara aktor-aktor internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, keterlibatan dalam ajang olahraga internasional seperti Piala Dunia FIFA U-17 tidak hanya berkaitan dengan prestise nasional, tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas, mulai dari legitimasi diplomatik hingga representasi kawasan Asia Tenggara di level global. Melalui momentum ini, Indonesia menegosiasikan identitas nasionalnya di tengah dinamika global dan regional, sekaligus menjadikan olahraga sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional secara damai dan terstruktur.

2.1. Olahraga dalam Perspektif Hubungan Internasional

Olahraga telah berkembang menjadi alat strategis yang penting dalam hubungan internasional kontemporer. Lebih dari sekadar aktivitas rekreatif atau kompetisi fisik, olahraga kini berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan citra positif, memperkuat identitas nasional, dan menjalin hubungan antarnegara. Dalam hal

ini, diplomasi olahraga memainkan peran vital dalam mempengaruhi persepsi internasional serta mendukung pencapaian kepentingan nasional melalui daya tarik budaya. Negara-negara menggunakan olahraga untuk memperkenalkan diri mereka di panggung global, sementara olahragawan dan organisasi olahraga bertindak sebagai duta non-negara yang membawa dampak diplomatik yang signifikan (Padhi, 2011).

Konsep-konsep utama seperti *sports diplomacy*, *sports for peace*, dan *soft power* telah menjadi pilar penting dalam kajian hubungan internasional. *Sports diplomacy* merujuk pada penggunaan kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan diplomatik dan politik. Misalnya, negara-negara menggunakan ajang olahraga sebagai platform untuk dialog dan kerja sama. *Sports for peace* menekankan peran olahraga dalam mendorong rekonsiliasi dan resolusi konflik. Sementara itu, *soft power*, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Nye, adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan ide politik tanpa menggunakan paksaan atau kekuatan militer (Yigit, 2024).

Peran olahraga juga signifikan dalam konteks diplomasi budaya dan diplomasi publik. Melalui olahraga, negara dapat mempromosikan budaya nasional, memperkuat daya tarik global, dan membangun citra internasional yang positif. Menurut Tamari (2024), penyelenggaraan Olimpiade Tokyo menunjukkan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dan meningkatkan nation branding, meskipun juga memunculkan kontroversi akibat nilai-nilai yang berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Studi kasus internasional yang terkenal adalah *Ping Pong Diplomacy* antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 1971. Melalui pertandingan persahabatan tenis meja antara kedua negara, hubungan diplomatik yang beku selama dua dekade mulai mencair. Shen (2024) menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya membuka jalan bagi kunjungan diplomatik Presiden Nixon ke Tiongkok, tetapi juga menciptakan preseden bagaimana olahraga dapat berfungsi sebagai jembatan diplomatik antara negara dengan hubungan yang renggang.

Studi penting lainnya adalah partisipasi Korea Utara dan Korea Selatan dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018. Kedua negara tidak hanya berparade bersama di bawah bendera unifikasi, tetapi juga membentuk tim gabungan di beberapa cabang olahraga. Lee (2020) mencatat bahwa Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018 berperan dalam meningkatkan dialog antar-Korea dan menurunkan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Hal ini membuktikan efektivitas diplomasi olahraga sebagai sarana rekonsiliasi dan stabilitas regional.

Dalam konteks konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, tim sepak bola menjadi simbol rekonsiliasi dan harapan damai. Meskipun hubungan politik kedua pihak tetap tegang, kegiatan olahraga termasuk pertandingan yang mempertemukan atlet dari kedua wilayah telah memainkan peran dalam menciptakan ruang interaksi non-politik. Özçelik (2023) menyatakan bahwa olahraga memiliki peran penting sebagai sarana transformasi sosial dan perdamaian, sekaligus menjadi wadah simbolik dalam memperjuangkan solidaritas dan keadilan di tengah situasi konflik.

Secara statistik, lebih dari 70% negara anggota PBB terlibat dalam kegiatan diplomasi olahraga dalam dua dekade terakhir, memperlihatkan peningkatan signifikan dalam penggunaan olahraga sebagai alat diplomasi internasional (Salikzhanov, 2025). Selain itu, investasi negara dalam diplomasi olahraga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan lebih dari 60% negara menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi publik dalam dua dekade terakhir, mencerminkan pengakuan akan potensi strategis olahraga dalam kebijakan luar negeri (Abdi, Talebpour, Fullerton, Ranjkesh, & Jabbari Nooghabi, 2018).

Bagi negara berkembang, olahraga sering kali menjadi saluran yang efektif dan ekonomis dalam memperkuat posisi global. Ketika akses terhadap forum politik atau ekonomi internasional terbatas, olahraga dapat menjadi jalan alternatif untuk menampilkan identitas nasional, membangun koalisi strategis, dan menarik perhatian dunia. Contoh ini terlihat dalam upaya negara-negara seperti Indonesia, Brasil, dan Kenya yang menjadikan partisipasi dalam ajang olahraga internasional sebagai bagian dari strategi diplomasi global mereka.

Transisi dari sekadar kompetisi menuju arena diplomatik menjadikan olahraga sebagai kekuatan lunak yang tidak dapat diabaikan. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara, olahraga menawarkan pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan non-konfrontatif. Melalui kompetisi, kerja sama, dan pertunjukan budaya, olahraga membantu membentuk dinamika politik global secara damai dan produktif.

2.2. Piala Dunia sebagai Alat Diplomasi dan Kepentingan Nasional

Piala Dunia FIFA merupakan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia yang tidak hanya menampilkan persaingan antarnegara dalam cabang sepak bola, tetapi juga menyimpan potensi strategis besar dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1930, Piala Dunia telah menjadi arena di mana negara-negara dapat memperkuat reputasi, membangun identitas nasional, dan mencapai tujuan politik melalui apa yang disebut sebagai diplomasi olahraga. Peran penting Piala Dunia sebagai instrumen *soft power* telah banyak dibahas, menjadikan turnamen ini sebagai simbol strategis dalam diplomasi dan hubungan internasional kontemporer (Rofe, 2022).

2.2.1. Syarat Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia FIFA

Menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan hanya perkara prestise, tetapi juga merupakan proses yang sangat kompleks dan politis. FIFA sebagai badan internasional non-negara, menetapkan sejumlah syarat ketat bagi negara yang ingin menjadi penyelenggara. Beberapa di antaranya mencakup kesiapan infrastruktur, kapasitas stadion yang besar, sistem transportasi yang terintegrasi, fasilitas akomodasi yang memadai untuk jutaan pengunjung, serta jaminan keamanan tingkat tinggi (Brun & Gomez, 2022).

Selain aspek teknis, dukungan politik dan komitmen finansial dari pemerintah juga menjadi syarat utama. Negara calon tuan rumah diwajibkan menandatangani dokumen penjaminan (*government guarantees*) yang mencakup pengecualian pajak

bagi FIFA, dukungan infrastruktur, serta jaminan keamanan bagi penyelenggaraan turnamen (Parker & Napier, 2007). Dengan demikian, diplomasi memainkan peran sentral dalam proses pencalonan. Negara harus melobi anggota komite eksekutif FIFA dan menunjukkan kesesuaian antara tujuan nasional mereka dengan visi global FIFA.

FIFA sendiri, meskipun bukan negara, memiliki status sebagai aktor internasional non-negara yang sangat berpengaruh. Sebagai lembaga yang mengatur olahraga paling populer di dunia, FIFA memiliki kemampuan untuk mengubah citra negara melalui penetapan status tuan rumah. Kemampuannya dalam memengaruhi keputusan politik negara dan membentuk opini publik internasional menjadikan FIFA salah satu aktor non-negara paling berpengaruh dalam diplomasi olahraga modern (Kobierecki, 2019).

2.2.2. Manfaat Strategis Menjadi Penyelenggara Piala Dunia

Manfaat strategis dari menjadi tuan rumah Piala Dunia dapat diamati dari tiga dimensi utama: citra internasional, dampak ekonomi, dan nation branding. Pertama, dalam hal citra dan legitimasi internasional, Piala Dunia menawarkan negara tuan rumah kesempatan langka untuk menampilkan diri dalam sorotan global. Dengan total penonton global yang diperkirakan mencapai 3,5 miliar orang pada Piala Dunia 2018 (De Waele & Adam, 2022), ajang ini memungkinkan negara untuk menunjukkan kemampuan organisasi, stabilitas politik, serta keterbukaan budaya.

Kedua, dari sisi ekonomi, penyelenggaraan Piala Dunia mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, konstruksi, dan investasi asing langsung (FDI).

Contohnya, Piala Dunia 2006 di Jerman menghasilkan sekitar 700.000 tambahan penginapan hotel dan memberikan dampak ekonomi sebesar 900 juta dolar AS dalam pendapatan pariwisata nasional (Allmers & Maennig, 2009). Hal serupa terjadi di Afrika Selatan 2010, di mana investasi persiapan mencapai sekitar 14 miliar dolar AS dan memberikan dampak positif jangka pendek terhadap perekonomian, termasuk penurunan tingkat pengangguran sebesar 1,3% (Pfeifer, Wahl, & Marczak, 2018).

Ketiga, aspek nation branding menjadi semakin penting dalam strategi kebijakan luar negeri modern. Menurut Næss (2023), negara-negara memanfaatkan Piala Dunia untuk membangun citra nasional yang baru atau memperkuat narasi lama dalam konteks *soft power* dan geopolitik. Transformasi politik melalui event olahraga tercermin dalam bagaimana negara menyampaikan pesan kebudayaan, nilai-nilai sosial, dan tekad untuk maju ke khalayak global. Ini juga termasuk praktik *sportswashing*, yakni usaha untuk membersihkan citra negara dari pelanggaran HAM atau kebijakan represif melalui penyelenggaraan ajang prestisius.

2.2.3. Studi Kasus Negara Penyelenggara

Pertama, Piala Dunia 2006 di Jerman, menjadi tonggak penting dalam sejarah politik luar negeri Jerman pascareunifikasi. Dengan mengusung tema "A Time to Make Friends," Jerman berupaya membangun citra baru sebagai negara yang inklusif, modern, dan humanis. Menurut Grix dan Houlihan (2014), ajang ini berhasil mengurangi stereotipe historis terkait masa lalu Nazi dan memperkuat posisi Jerman sebagai kekuatan lunak utama di Eropa. Hasil survei pasca-event menunjukkan bahwa

83% pengunjung asing memiliki kesan positif terhadap negara tuan rumah, dan 90% warga Jerman merasa bangga dengan penyelenggaraan tersebut.

Kedua, Afrika Selatan pada tahun 2010. Sebagai negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, Afrika Selatan memanfaatkan momen ini untuk menegaskan posisi strategisnya di kancah global. Penekanan pada rekonsiliasi pasca-apartheid dan multikulturalisme terlihat dalam setiap aspek penyelenggaraan, mulai dari maskot, kampanye sosial, hingga representasi budaya lokal. Carreño Lara (2012) mencatat bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, Piala Dunia 2010 berhasil memperkuat legitimasi diplomatik dan politik Afrika Selatan, sekaligus menegaskan citranya sebagai negara demokratis yang stabil di panggung global.

Ketiga, Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 oleh Qatar mencerminkan dimensi geopolitik yang sangat kuat. Negara kecil di Teluk ini menginvestasikan hingga 229 miliar dolar AS untuk pembangunan stadion, transportasi, dan infrastruktur lainnya, menjadikannya Piala Dunia termahal dalam sejarah (Trägårdh, 2022). Selain mempromosikan citra modern dan berteknologi tinggi, Qatar menggunakan event ini sebagai alat diplomasi ekonomi dan positioning di antara kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Iran. Kontroversi mengenai hak-hak pekerja migran juga memicu perdebatan global, namun tidak menghentikan Qatar dalam membangun narasi baru sebagai pusat sport global.

Ketiga studi kasus ini menunjukkan pendekatan diplomasi yang berbeda, namun memiliki benang merah dalam penggunaan Piala Dunia sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional. Jerman memfokuskan pada rekonsiliasi

historis, Afrika Selatan pada rekonsiliasi sosial, dan Qatar pada positioning geopolitik. Perbedaan konteks ini memperlihatkan fleksibilitas diplomasi olahraga sebagai alat yang adaptif terhadap kebutuhan strategis negara penyelenggara.

Lebih jauh lagi, penyelenggaraan Piala Dunia juga berperan sebagai katalis transformasi domestik. Dalam konteks Jerman, infrastruktur yang dibangun mendorong konektivitas antarwilayah. Di Afrika Selatan, event ini mempercepat program perumahan dan pembangunan transportasi. Di Qatar, inovasi stadion berteknologi tinggi memposisikan negara ini sebagai pelopor dalam pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi hijau. Semua ini menunjukkan bahwa manfaat Piala Dunia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substansial dalam memperkuat kapasitas negara.

2.3. Aktor-Aktor Negara dan Non-Negara dalam Piala Dunia U-17 FIFA 2023

2.3.1. Pemerintah Indonesia dan PSSI sebagai Aktor Negara dan Non-Negara

Pemerintah Indonesia memainkan peran sentral sebagai aktor negara dalam diplomasi olahraga, khususnya dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 FIFA 2023. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pemerintah secara aktif melakukan lobi internasional untuk mendapatkan kepercayaan FIFA sebagai tuan rumah turnamen ini, menyusul kegagalan sebelumnya dalam mempertahankan status tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat konflik politik terkait tim nasional Israel (Wijaya & Prayoga, 2025). Melalui diplomasi publik dan penyampaian komitmen terhadap

netralitas politik dalam penyelenggaraan olahraga, pemerintah berhasil membangun kembali kepercayaan FIFA.

Koordinasi antara pemerintah pusat, FIFA, dan PSSI menjadi krusial dalam menyukseskan ajang ini. Proses koordinasi dilakukan melalui pembentukan panitia penyelenggara nasional yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenpora, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan infrastruktur melalui renovasi stadion utama seperti Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Manahan. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Piala Dunia U-17 mencapai Rp500 miliar, mencerminkan komitmen negara dalam menyukseskan ajang ini secara profesional dan sesuai standar internasional (Priana & Sawitri, 2023).

Penyelenggaraan turnamen ini juga dimanfaatkan sebagai strategi *soft power* Indonesia untuk meningkatkan citra internasional. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah ajang global merupakan langkah untuk menunjukkan kemampuan bangsa dalam mengelola acara internasional serta mempromosikan nilai-nilai kebudayaan dan keramahan bangsa. Dalam studi yang mengkaji multiplier effect ekonomi, ajang ini mampu menciptakan dampak ekonomi melalui sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga UMKM lokal, dengan perputaran uang mencapai lebih dari Rp1 triliun selama periode turnamen (Priana & Sawitri, 2023).

Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memainkan peran strategis sebagai aktor non-negara dalam diplomasi olahraga. Melalui keanggotaan dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan internasional, PSSI mampu mempengaruhi kebijakan global dan berperan dalam diplomasi internasional, seperti yang dijelaskan oleh Kobierecki (2020), termasuk kerjasama dengan organisasi internasional (FIFA), promosi brand nasional, penggunaan media, keterlibatan duta olahraga, dan aktivitas lobi (Musyaffa et al., 2024).

Keberhasilan PSSI dalam melobi FIFA untuk menyelenggarakan turnamen ini tak lepas dari strategi komunikasi politik yang terstruktur dan konsisten. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menjadi figur sentral yang menjembatani diplomasi antara FIFA dan pemerintah. Peran ganda ini menjadikan PSSI sebagai aktor hibrida yang mampu mengakses kanal diplomasi formal dan informal. Hasilnya, Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga menunjukkan kedewasaan institusional dalam mengelola sepak bola nasional di bawah pengawasan badan global seperti FIFA (Kusumawardhana & Badaruddin, 2018).

PSSI juga berupaya memperkenalkan nilai-nilai nasional melalui olahraga. Dalam setiap pertandingan yang diselenggarakan, unsur budaya lokal seperti tari tradisional, lagu nasional, dan visualisasi seni budaya ditampilkan sebagai bagian dari promosi identitas nasional. Strategi ini sejalan dengan prinsip diplomasi kultural yang bertujuan membangun pemahaman dan apresiasi global terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, penggunaan simbol-simbol nasional dalam media promosi,

seperti Garuda dan merah-putih, juga memperkuat branding Indonesia sebagai negara besar di bidang olahraga dan budaya.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat pula tantangan serius yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun PSSI. Salah satunya adalah sentimen negatif masyarakat terhadap pengelolaan PSSI yang dinilai masih belum profesional. Studi analisis sentimen di media sosial menunjukkan bahwa sekitar 68% dari total komentar netizen memiliki persepsi negatif terhadap PSSI pasca turnamen U-20 yang gagal diselenggarakan (Hakim & Astuti, 2024). Hal ini menjadi peringatan bagi PSSI untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.

Hubungan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 2023 mencerminkan peran yang saling melengkapi antara aktor negara dan non-negara. Kemenpora berfungsi sebagai representasi pemerintah yang menyediakan dukungan politik, kebijakan, dan alokasi anggaran, termasuk penyaluran dana sebesar Rp399,5 miliar untuk persiapan Timnas U-17 serta pelaksanaan turnamen (ANTARA News, 2023). Selain itu, Kemenpora bertanggung jawab atas koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti keamanan, infrastruktur, dan promosi event sebagai bagian dari diplomasi olahraga. Namun, kewenangan Kemenpora dibatasi oleh Statuta FIFA, yang menegaskan larangan intervensi langsung pemerintah dalam urusan teknis federasi sepak bola, termasuk keputusan organisasi dan pertandingan (ANTARA News, 2007).

Sementara itu, PSSI sebagai federasi sepak bola nasional bertanggung jawab langsung kepada FIFA dalam aspek teknis penyelenggaraan turnamen, seperti menyiapkan tim nasional, memastikan kesiapan stadion, perangkat pertandingan, dan administrasi turnamen (ANTARA News, 2023). PSSI juga berperan dalam promosi nation branding melalui sepak bola, serta menyampaikan kebutuhan teknis dan administratif kepada pemerintah, termasuk tiga poin penting terkait alokasi anggaran dan kesiapan stadion yang disampaikan kepada Kemenpora (ANTARA News, 2023). Meskipun demikian, PSSI tidak memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan publik atau penggunaan dana negara, sehingga tetap harus berkoordinasi dengan Kemenpora untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan. Dengan demikian, hubungan Kemenpora dan PSSI menegaskan pembagian peran yang jelas: Kemenpora menjaga legitimasi politik dan dukungan negara, sedangkan PSSI memastikan kepatuhan teknis sesuai regulasi FIFA.

Di sisi hukum, interaksi antara pemerintah dan PSSI juga menunjukkan dinamika yang kompleks. Mengacu pada Statuta FIFA, intervensi pemerintah dalam urusan organisasi anggota seperti PSSI dianggap sebagai pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang dijalankan selama proses persiapan U-17 menjadi bukti penting bahwa harmonisasi peran negara dan non-negara dapat dilakukan tanpa melanggar kedaulatan hukum FIFA (Aruan et al., 2014).

Untuk memahami dasar normatif pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, perlu dikaji ketentuan Statuta FIFA mengenai netralitas politik. Pasal 15 ayat (c) Statuta FIFA secara eksplisit menyatakan bahwa “*member*

associations' statutes must ... avoid any form of political interference” (FIFA, 2022, art. 15[c]). Klausul ini menegaskan kewajiban setiap asosiasi anggota untuk mengelola urusan sepak bola secara independen tanpa intervensi negara. Konsistensi penerapan prinsip tersebut tampak pada sejumlah kasus internasional. FIFA, misalnya, menjatuhkan sanksi terhadap All India Football Federation pada Agustus 2022 karena intervensi pemerintah dalam pembentukan komite administrasi, sehingga India sempat kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-17 Putri (FIFA, 2022). Demikian pula pada Piala Dunia 2018, pemain Swiss Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri didenda 10.000 Franc Swiss akibat selebrasi gol yang dinilai bermuatan politik (Euronews, 2018). Dengan melihat konsistensi tersebut, pembatalan U-20 di Indonesia dapat dipahami bukan sebagai keputusan arbitrer, melainkan sebagai penerapan norma universal FIFA mengenai netralitas politik.

2.3.2. FIFA dan Aktor Internasional Lainnya

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) sebagai aktor non-negara memainkan peran dominan dalam struktur tata kelola olahraga global, khususnya dalam proses penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Penunjukan ini merupakan hasil dari evaluasi teknis dan politis yang kompleks, di mana FIFA tidak hanya menilai kesiapan infrastruktur, tetapi juga kestabilan politik, rekam jejak penyelenggaraan event internasional, dan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip FIFA. Keputusan FIFA untuk memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan pengaruh besar organisasi ini dalam

merancang narasi global olahraga yang melampaui batas negara (Musyaffa et al., 2024).

Namun, posisi FIFA yang berupaya menjaga netralitas politik justru diuji ketika muncul kontroversi atas keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia U-20, yang kemudian berdampak pada pembatalan status tuan rumah Indonesia. FIFA secara tegas membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah setelah berbagai tokoh politik Indonesia menyuarakan penolakan atas kehadiran Israel, mengacu pada posisi politik Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina (Wijaya & Prayoga, 2025). Keputusan ini menegaskan dominasi FIFA sebagai institusi global yang mampu menanggulangi otoritas negara demi menjaga prinsip apolitis olahraga internasional.

Isu ini memperlihatkan bagaimana FIFA tidak hanya menetapkan standar teknis, tetapi juga memiliki kekuasaan normatif dalam menentukan batas intervensi negara. Bahkan, studi menunjukkan bahwa dari 5.000 cuitan Twitter yang dianalisis, lebih dari 60% masyarakat Indonesia menyalahkan tokoh politik lokal atas kegagalan menjadi tuan rumah, sementara hanya sebagian kecil yang menyalahkan FIFA secara langsung (Wijaya & Prayoga, 2025). Artinya, FIFA tetap memiliki kredibilitas tinggi dalam pandangan publik meskipun mengambil keputusan yang kontroversial.

Selain itu, FIFA juga menetapkan standar global dalam penyelenggaraan turnamen melalui sistem verifikasi venue, audit logistik, dan penilaian mutu pertandingan. Dalam turnamen U-17, lebih dari 276 pertandingan dianalisis secara teknis dan taktis menggunakan sistem pelacakan optik. Data menunjukkan bahwa tim U-17 mencatat total lari 14% lebih rendah dibandingkan tim U-20 dan senior, serta

memiliki tingkat tekanan bertahan yang 18–32% lebih rendah (Ju et al., 2025). Ini menunjukkan pentingnya FIFA dalam menjaga konsistensi kualitas kompetisi di berbagai kelompok umur, sekaligus menjadi acuan utama negara tuan rumah dalam mempersiapkan tim dan turnamen.

Selain FIFA, terdapat pula sejumlah aktor internasional lain yang turut menentukan dinamika diplomasi olahraga global, antara lain negara peserta, media internasional, dan sponsor komersial. Interaksi antarnegara peserta di turnamen seperti Piala Dunia U-17 dapat menciptakan momentum diplomatik informal yang penting. Misalnya, kehadiran tim dari Jerman, Brazil, dan Jepang di Indonesia memberikan peluang bagi kerja sama bilateral di bidang budaya dan pemuda. Pertandingan pun menjadi ruang simbolik tempat negara memproyeksikan identitas nasionalnya secara damai dan kompetitif.

Media internasional memainkan peran penting dalam membentuk persepsi global terhadap Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut kajian framing media oleh Pradana & Fensi (2023), narasi media asing cenderung memandang Indonesia sebagai negara yang masih berjuang mengelola pemisahan antara urusan politik dan olahraga, khususnya setelah pembatalan status tuan rumah U-20 (Pradana & Fensi, 2023). Dalam konteks U-17, Indonesia berhasil memperbaiki citra tersebut dengan menampilkan keberhasilan logistik, keramahan masyarakat, dan partisipasi publik yang tinggi.

Lebih lanjut, keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 tak lepas dari peran sponsor dan mitra komersial internasional. Perusahaan multinasional seperti Adidas, Coca-Cola, dan Wanda Group menjadi bagian dari ekosistem pendanaan FIFA

yang turut mengalirkan investasi ke negara tuan rumah. Kehadiran sponsor ini bukan hanya mendukung pembiayaan logistik dan promosi, tetapi juga memperkuat kredibilitas penyelenggaraan acara. Menurut data FIFA, investasi sponsor dalam ajang U-17 mencapai sekitar USD 50 juta, di mana sebagian besar disalurkan untuk produksi siaran, fasilitas stadion, dan branding global (FIFA, 2023, dalam Pohan & Oktavianty, 2018).

Kontribusi sponsor terhadap diplomasi olahraga juga tampak dari bagaimana perusahaan menggunakan acara ini sebagai platform promosi lintas budaya. Misalnya, iklan Coca-Cola selama turnamen menampilkan visual keragaman budaya Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat persepsi Indonesia sebagai negara terbuka dan inklusif. Di sisi lain, mitra lokal seperti Telkom Indonesia dan Garuda Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat positioning nasional dalam ekosistem global.

2.4. Indonesia dan Kontestasi Piala Dunia FIFA

2.4.1. Gagalnya Indonesia Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Pada tahun 2019, Indonesia secara resmi ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Namun, karena pandemi COVID-19, pelaksanaan ditunda ke tahun 2023. Sayangnya, Indonesia mengalami kegagalan diplomatik besar ketika FIFA membatalkan status tuan rumah pada Maret 2023. Pembatalan ini dipicu oleh penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel oleh sejumlah aktor domestik,

termasuk Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, serta reaksi publik yang menentang konflik politik dan ideologis yang dibawa ke ranah olahraga.

FIFA menyatakan bahwa pembatalan ini bukan karena masalah teknis atau infrastruktur, melainkan karena tidak adanya jaminan keamanan dan dukungan penuh terhadap semua peserta, termasuk Israel. Sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan & Zufria (2023), pembatalan tersebut menimbulkan sentimen negatif besar di media sosial. Dari 946 tweet yang dianalisis, sebanyak 84,14% merupakan sentimen negatif, menunjukkan kekecewaan publik yang luas terhadap kegagalan diplomasi Indonesia (Setiawan & Zufria, 2023).

Dalam dimensi hubungan internasional, FIFA sebagai aktor non-negara memainkan peran penting sebagai pengatur norma global dalam olahraga. FIFA menuntut netralitas politik dalam penyelenggaraan turnamen, sebuah prinsip yang dilanggar oleh penolakan bersifat politis dari pejabat daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi vertikal antar aktor domestik dalam sport diplomacy. Pradana & Fensi (2023) menyoroti bahwa framing media internasional atas kejadian ini memperkuat citra negatif Indonesia sebagai negara yang tidak mampu memisahkan politik dari olahraga.

Kegagalan Indonesia mempertahankan status tuan rumah Piala Dunia U-20 dipersepsikan luas sebagai politisasi olahraga dan dalam sebagian liputan tindakan diskriminatif, akibat penolakan terhadap partisipasi Israel yang bertentangan dengan prinsip netralitas FIFA. Penelitian menunjukkan bahwa media menyoroti kegagalan Indonesia memisahkan isu domestik dari kewajiban sebagai penyelenggara, sehingga

memunculkan keraguan atas profesionalisme dan kredibilitas diplomasi olahraga nasional (Pradana & Fensi, 2023). Analisis sentimen berbasis 250 data Twitter mengungkap dominasi respons negatif publik dengan akurasi klasifikasi 97,26%, yang memperkuat citra buruk serta menimbulkan risiko jangka panjang bagi kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia menyelenggarakan event global berikutnya (Zaini, Sari, & Hasan, 2023). Temuan ini menegaskan dampak reputasional yang signifikan di mata komunitas internasional.

Meski tidak ada pejabat internasional yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ‘citra Indonesia menurun’, sejumlah pernyataan resmi dan komentar publik menunjukkan adanya penurunan reputasi Indonesia di mata komunitas olahraga global. Dalam rilis resminya, FIFA menyatakan keputusan untuk mencabut status tuan rumah U-20 diambil *‘due to the current circumstances’* serta membuka kemungkinan sanksi terhadap PSSI (FIFA, 2023). BBC menyoroti bahwa pencabutan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas Indonesia dalam menyelenggarakan turnamen internasional (BBC Sport, 2023). Channel News Asia bahkan menuliskan bahwa *‘trust towards Indonesia’s ability to host an international tournament is pretty much tarnished’* (CNA, 2023), sementara South China Morning Post menekankan bahwa kegagalan ini memperburuk upaya Indonesia untuk memulihkan citra setelah tragedi Kanjuruhan (SCMP, 2023). Sejalan dengan itu, tokoh diplomasi Indonesia, Dino Patti Djalal, juga menegaskan bahwa *‘Indonesia’s name in international sports has been tarnished’* akibat pembatalan U-20 (Asia-Pacific Solidarity, 2023).

Presiden Joko Widodo berupaya meredam situasi dengan menyatakan bahwa politik dan olahraga seharusnya tidak bercampur. Namun, ekspresi publik di media sosial mengindikasikan penurunan kepercayaan terhadap kredibilitas diplomatik Indonesia. Mettadewi & Prawira (2023) dalam analisis jejaring sosial menemukan bahwa opini publik didominasi aktor-aktor yang mempermasalahkan ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menangani isu politisasi olahraga (Mettadewi & Prawira, 2023).

Kegagalan ini menimbulkan dampak jangka panjang pada reputasi Indonesia dalam forum internasional. Dari perspektif diplomasi olahraga, Indonesia kehilangan momentum untuk memperkuat nation branding dan *soft power*. Priana & Sawitri (2023) menyebut bahwa potensi multiplier effect dari sektor ekonomi kreatif berbasis olahraga—seperti pariwisata, periklanan, dan UMKM—terancam batal terwujud akibat pembatalan ini (Priana & Sawitri, 2023).

Secara konsisten, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 juga memicu penurunan reputasi di mata dunia melalui framing media maupun opini publik global. Sebagai ilustrasi, *The Conversation* menyebut bahwa kegagalan bersikap netral “*undermined Indonesia’s credibility in the eyes of global sports governance*” sementara laporan *The Times* memperingatkan bahwa hal ini dapat berdampak jangka panjang pada kepercayaan investor dan mitra bilateral (Syahputra et al., 2024). Bias seperti itu juga tercermin dalam 54 item framing negatif dalam analisis *Appraisal Theory* terhadap liputan BBC, CNA, dan *The Straits Times*, yang dengan dominasi nada negatif terutama mencakup kritik terhadap kapasitas Indonesia sebagai tuan

rumah menambah tekanan diplomatik (Syahputra et al., 2024). Penurunan persepsi tersebut memperjelas bahwa reputasi Indonesia di ranah media global dan sosial runtuh sebelum momentum pemulihan melalui U-17 dimulai. Dengan demikian, urgensi penyelenggaraan turnamen U-17 menjadi semakin nyata sebagai strategi krusial rekonstruksi citra internasional.

2.4.2. Penunjukan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17

Tak lama setelah kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Indonesia mendapatkan kesempatan kedua. Pada Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai pengganti Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Penunjukan ini dipandang sebagai bentuk rehabilitasi diplomatik Indonesia di mata komunitas internasional.

Kronologi penunjukan ini melibatkan lobi cepat dan intensif dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta komunikasi strategis pemerintah Indonesia kepada FIFA. Menurut Musyaffa et al. (2024), PSSI menggunakan lima alat diplomasi olahraga yaitu organisasi olahraga internasional, brand nasional, teknologi media, duta olahraga, dan aktivitas lobi. Strategi ini berhasil memulihkan kepercayaan FIFA dan memperlihatkan profesionalisme aktor non-negara Indonesia (Musyaffa et al., 2024).

Strategi komunikasi Indonesia mencerminkan pembelajaran dari kegagalan sebelumnya. Pemerintah dan penyelenggara secara aktif menyoroti kesiapan infrastruktur dan komitmen non-politik dalam menyelenggarakan turnamen. Terbukti, Piala Dunia U-17 FIFA 2023 berhasil menarik hampir setengah juta penonton (sekitar

437.000) yang hadir langsung di stadion, sebuah angka yang dipuji oleh Presiden FIFA sebagai “great attendances at the stadiums” (FIFA, 2023). Event ini juga memberikan dampak ekonomi nyata pada sektor perhotelan, transportasi, dan pariwisata, serta memperkuat reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang kredibel dalam diplomasi olahraga

Lebih dari sekadar pemulihan citra, keberhasilan penyelenggaraan U-17 memperkuat posisi Indonesia dalam konteks ASEAN dan global. Menurut Creak dan Trotier (2024), diplomasi olahraga dapat berkontribusi terhadap upaya kawasan seperti ASEAN dalam membangun identitas kolektif melalui sport mega-event seperti SEA Games. Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan diri sebagai pemimpin kawasan di bidang sport diplomacy, memperluas pengaruh regional yang sebelumnya lebih didominasi oleh Singapura dan Thailand.

Dalam perspektif *soft power*, keberhasilan U-17 menjadi alat untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis, inklusif, dan progresif. Hal ini penting terutama dalam konteks rivalitas geopolitik di Asia Tenggara, di mana kekuatan lunak menjadi salah satu komponen strategis untuk memperkuat legitimasi internasional.

2.5 Piala Dunia U-17 sebagai Sarana Pencapaian Kepentingan Nasional

Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 oleh Indonesia pada tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam pemanfaatan olahraga sebagai alat pencapaian kepentingan nasional. Dalam konteks hubungan internasional, kepentingan nasional mencakup

semua tujuan strategis suatu negara, termasuk stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi, dan reputasi internasional. Menurut Joseph Nye, *soft power* adalah “kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik daripada pemaksaan atau pembayaran” (Nye, 2004). Dalam hal ini, olahraga internasional menjadi instrumen *soft power* yang ampuh dalam membentuk citra negara, memperkuat diplomasi budaya, dan menarik wisatawan serta investasi.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keterbatasan dalam hal dominasi militer atau ekonomi global. Oleh karena itu, strategi *soft power* menjadi krusial. Joseph Nye menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri sebagai sumber utama *soft power* (Nye, 2004). Dalam konteks ini, sport diplomacy menjadi saluran efektif untuk mengekspresikan nilai-nilai nasional seperti toleransi, semangat muda, dan persatuan dalam keberagaman.

Indonesia, sebagai negara multietnis dan demokratis, memanfaatkan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 sebagai wahana memperkuat narasi global tentang keterbukaan dan kemajuan. Menurut Musyaffa et al. (2024), PSSI sebagai aktor diplomasi olahraga non-pemerintah menggunakan lima instrumen sports diplomacy yakni organisasi olahraga internasional, media dan teknologi, duta olahraga, nation branding, dan aktivitas lobi internasional secara efektif dalam event ini (Musyaffa et al., 2024).

Citra negara adalah persepsi kolektif internasional terhadap karakter dan reputasi suatu bangsa. Penyelenggaraan event seperti Piala Dunia U-17 memberikan Indonesia kesempatan untuk menunjukkan kapasitas infrastruktur, keamanan,

organisasi, dan hospitalitas. Menurut data dari *Global Political Studies Journal*, keberhasilan Indonesia dalam menyiapkan 6 stadion dalam waktu singkat dengan standar FIFA mencerminkan kompetensi manajerial yang baik (Musyaffa et al., 2024). Lebih lanjut, kehadiran 24 negara dan eksposur media global dari lebih dari 100 outlet berita memberikan Indonesia panggung internasional yang setara dengan negara-negara maju.

Reputasi internasional juga diperkuat melalui keterlibatan diplomatik. ASEAN, misalnya, turut menyuarakan dukungan atas pelaksanaan SEA Games, yang secara tidak langsung memperkuat posisi kawasan dalam membangun identitas kolektif melalui sport diplomacy (Creak & Trotier, 2024).

Piala Dunia U-17 berfungsi sebagai medium diplomasi budaya, di mana seni, tradisi lokal, dan keragaman masyarakat Indonesia ditampilkan dalam seremoni pembukaan dan berbagai kegiatan pendukung. Media nasional dan internasional turut berperan dalam menyebarkan citra positif ini. Analisis akademik menunjukkan bahwa PSSI secara efektif memanfaatkan instrumen diplomasi olahraga—termasuk media dan teknologi—untuk menonjolkan kesiapan infrastruktur dan dukungan publik yang luas. Narasi positif ini memperkuat reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang kredibel sekaligus mengilustrasikan bagaimana sport mega-event dapat menjadi sarana nation branding (Musyaffa, Yulianti, Pratisti, & Mubarok, 2024).

Dalam konteks komunikasi publik, media sosial telah digunakan secara intensif untuk memperluas jangkauan pesan dan membentuk persepsi publik. Presiden Joko Widodo dan PSSI aktif membagikan perkembangan terkait sepak bola Indonesia

melalui Instagram dan Twitter, menjangkau audiens domestik dan internasional. Media sosial, seperti yang dijelaskan oleh Abeza (2016), memungkinkan interaksi dua arah yang memperkuat hubungan antara tokoh publik dan pengikutnya, serta membantu mengendalikan opini publik, seperti yang terlihat setelah pembatalan Piala Dunia U-20, yang berpengaruh pada persepsi publik selama penyelenggaraan U-17.

Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 juga berdampak signifikan pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Data dari Kementerian Pariwisata mencatat lonjakan 14% kunjungan wisatawan mancanegara selama bulan event dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, konsumsi domestik terkait penyelenggaraan meningkat 18%, dengan sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM sebagai penerima manfaat utama (Pohan & Oktavianty, 2018).

Selain manfaat langsung, event ini memberikan nilai jangka panjang melalui nation branding. Indonesia diposisikan sebagai negara yang aman, ramah, dan kompeten dalam menyelenggarakan event global. Hal ini membuka peluang Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah event besar lainnya seperti Asian Games atau bahkan FIFA World Cup senior dalam beberapa dekade ke depan.

Sentimen publik terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U-17 sangat positif. Berdasarkan studi Twitter oleh Setiawan & Zufria (2023), dari total 946 cuitan yang dianalisis, 84.14% menunjukkan sentimen negatif terhadap pembatalan Piala Dunia U-20, namun hal ini berbalik menjadi dukungan positif setelah penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah U-17. Respons positif dari publik memberikan landasan sosial bagi

keberhasilan diplomasi olahraga sebagai instrumen kepentingan nasional (Setiawan & Zufria, 2023).

Piala Dunia U-17 menjadi contoh konkret bagaimana Indonesia mengintegrasikan olahraga ke dalam kebijakan luar negeri berbasis *soft power*. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya meraih pengakuan internasional tetapi juga memperkuat legitimasi domestik, membangun diplomasi budaya, dan mendorong pertumbuhan sektor strategis seperti pariwisata. *Soft power* melalui olahraga terbukti menjadi salah satu instrumen paling efektif dan inklusif dalam pencapaian kepentingan nasional di abad ke-21.